

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih oleh anggota DPRD, namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilu. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pertama kali digelar pada Juni 2005. Pilkada langsung ini merupakan proses demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia.

Sejak tahun 2005, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia diselenggarakan secara langsung atau di pilih langsung oleh masyarakat Indonesia, hal ini menunjukkan adanya kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerahnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan asas langsung, umum, jujur, rahasia dan adil”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan jelas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Indonesia melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah di atur dalam Undang-Undang tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 1 ayat 20 disebutkan bahwa “Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sudah diamanatkan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu kemajuan dan pembaharuan, pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi babak baru dalam system perpolitikan di Indonesia, dimana rakyat dilibatkan langsung dalam proses demokrasi tersebut.

Pilkada langsung merupakan proses berkembangnya demokrasi dengan jalan untuk mewujudkannya kedaulatan rakyat di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Rakyat terlibat secara langsung dalam proses Pilkada dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kehendak masyarakat. Pilkada langsung merupakan pelaksanaan kedaulatan masyarakat ditingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Artinya rakyat mempunyai hak untuk menentukan dan memilih kepala daerah sesuai dengan tingkatannya, ditingkat provinsi rakyat memilih Gubernur sebagai kepala daerah di provinsinya, ditingkat kabupaten rakyat memilih Bupati sebagai kepala daerah di kabupatennya, sedangkan di tingkat kota rakyat memilih walikota sebagai kepala daerahnya di Kota. Pilkada langsung mempunyai kolerasi yang erat terhadap pelaksanaan kedaulatan masyarakat. Dengan pelaksanaan Pilkada langsung, rakyat selaku pemegang kedaulatan sehingga terjalin hubungan yang sangat erat antara kepala

daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak menjamin terpilihnya calon kepala daerah yang berkualitas. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 10 (Pratikno, 2007:3) Pemilihan kepala daerah secara langsung dikatakan berkualitas apa bila memenuhi unsur berikut :

1. Kualitas administratif proses electoral, yaitu bagaimana jadwal ditepati dan bagaimana kesiapan regulasi, anggaran dan daftar pemilih dalam pilkada.
2. Kualitas politis dan proses electoral, yaitu bagaimana kemandirian dan legitimasi penyelenggara dapat dijamin, dan minimalnya intensitas konflik.
3. Kualitas produk pilkada, yaitu bagaimana pilkada bisa dihasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas.

Pilkada bisa dikatakan berkualitas ditentukan oleh aturan main yang mampu menjamil Pilkada yang demokratis, jadi tidak hanya ditentukan oleh proses pelaksanaan pemilu. Pilkada dapat dikatakan berkualitas maka dibutuhkanlah pemilih atau masyarakat yang rasional dari para kandidat calon kepala daerah yang kapabel dan akseptebel.

Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia sejak reformasi bergulir merupakan sejarah baru dalam kehidupan politik maupun pemerintahan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya diikuti pemilihan kepala daerah secara langsung hamper tanpa konflik berkepanjangan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Pilpres dan pilkada secara langsung merupakan mekanisme politik

baru dalam berdemokrasi yang hamper mustahil terwujud selama rezim orde baru. Indikator keberhasilan pilkada secara kuantitatif bisa dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 65% selama pilkada di wilayah Jawa Tengah, jumlah calon kepala daerah, dinamika partai politik dalam mempersiapkan pilkada, kesiapan KPUD sampai dengan keamanan selama tahapan pilkada berlangsung hingga berakhir pelantikan kepala daerah hasil pilkada. Keberhasilan demokrasi ini menjadikan Indonesia ditempatkan sebagai *new state of democracy* dalam pergaulan internasional, Indonesia sebelumnya dikenal sebagai negeri tumbuh suburnya dictator dan otoritarisme. Demokrasi sebagai *universal value* tidak akan menjadi hak kepemilikan individu atau kelompok di tengah masyarakat, namun merupakan entitas yang memiliki nilai lintas sektoral serta diperjuangkan sebagai instrument membangun kesejahteraan politik dalam masyarakat yang telah dipraktekkan pada pilkada langsung 2005 yang lalu. Ditengah kehidupan masyarakat yang plural dan sosial budaya yang beragam, maka demokrasi merupakan salah satu lem perekat dari keadaan tersebut.

Dalam prakteknya, demokrasi merupakan konsensus dari beberapa kelompok dan kepentingan melalui mekanisme tertentu yang telah disepakati Bersama. Demokrasi akan memiliki relasi yang signifikan dengan terminology komunikasi politik yang merupakan instrument strategis untuk mengantarkan terbentuknya ruang publik sebagai prasyarat demokrasi. Karena roh demokrasi yang sebenarnya merupakan kebebasan yang sesungguhnya membutuhkan partisipasi dalam bentuk demokrasi langsung. Dan hal itu semua sudah dipenuhi pada saat pelaksanaan pilkada langsung beberapa waktu lalu.

Pilkada sebagai mekanisme demokrasi yang sangat membutuhkan sarana komunikasi politik dalam kenyataannya tidak bisa lepas dari kemunculan isu, desas-desus dan rumor yang selalu menyertai proses pelaksanaan pilkada. Dinamika komunikasi tersebut tidak bisa disalahkan pada para pelaku politik termasuk komponen sosial yang terlibat didalamnya, karena merupakan proses transisi demokrasi untuk menuju idealita harapan publik untuk mendapatkan pemimpin sebaik mungkin. Ranah komunikasi politik diwarnai pernyataan maupun lontaran pesan yang dirasakan bisa merugikan para calon kepala daerah. Pernyataan-pernyataan yang terkemas dalam komunikasi politik selama pilkada tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena ketidakjelasan sumber-sumber serta dukungan data-data yang ada. Lalu muncul *black campaign* atau *black propaganda*. Dengan hal tersebut, tim sukses beserta parpol pengusung calon kepala daerah sangat resah dan sibuk menangkis pernyataan-pernyataan atau informasi yang telah berkembang menjadi opini publik yang menyerang calon kepala daerah yang didukungnya.

Demokrasi dalam partai politik dan pilkada merupakan instrument untuk mencapai kekuasaan. Sementara dalam pilkada terlihat masih terlihat aroma politik uang, korupsi dan kebohongan publik yang sangat melekat pada praktek politik yang sangat bersebrangan dengan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya seperti : kejujuran, keterbukaan mendahulukan kepentingan umum dan kebebasan memilih. Partai politik sebagai tumpuan dan harapan masyarakat diharapkan mampu menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tawaran Georg Sorensen (2003: 105) bahwa “jalan terbaik untuk memulai

demokrasi adalah dengan berperan aktif di partai politik”. Cita-cita dan kepentingan publik harus dikemas kedalam komunikasi politik agar bisa direalisasikan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) yang telah memperoleh legitimasi resmi melalui pilkada dan telah berjanji kepada pendukungnya melalui lontaran pesan yang disampaikan pada saat kampanye.

Komunikasi politik yang gencar dilakukan oleh calon kepala daerah dalam pilkada bertujuan untuk membangun citra dan opini yang berakhir pada bujukan untuk mendapatkan dukungan suara untuk meraih kemenangan dalam pilkada. Melalui komunikasi politik yang dibangun para calon kepala daerah dengan kampanye melalui media, kampanye dialogis, maupun kampanye terbuka mereka berharap akan meraih kemenangan pada pilkada. Selain itu tujuan lainnya yaitu guna meraih kekuasaan dan memperluas pengaruh untuk mendapatkan otoritas yang sah sebagai prasyarat dari demokrasi. Dalam komunikasi politik, peran Bahasa sangat strategis untuk mengemas sebuah pesan atau pernyataan yang disampaikan kepada publik. Dalam kampanye pilkada kualitas individu sangat berpengaruh pada penampilan seorang calon kepala daerah secara komprehensif di hadapan publik. Pesan maupun pernyataan calon kepala daerah selama kampanye pilkada akan dipahami oleh publik, publik akan menilai seberapa tingkat kualitas calon kepala daerah dalam menarasikan kehendak rakyat kedalam Bahasa yang dikemas ke dalam komunikasi politik, sebagai ekspresi kebijakan yang akan diambil ketika kelak akan terpilih menjadi kepala daerah.

Komunikasi politik sebagai salah satu instrumen untuk mendidik masyarakat kritis dan sabar mengikuti dinamika komunikasi politik sebagai syarat

berkembangnya budaya demokrasi yang modern. Bahasa digunakan sebagai narasi isi pesan dari komunikasi politik yang lebih mendidik rakyat dan mencerdaskan rakyat dalam menentukan kepala daerah mendatang. Dalam komunikasi politik, Bahasa sebagai instrument strategis masih membutuhkan dukungan kebebasan dan keterbukaan dalam ruang publik ditengah masyarakat, sesuai dengan konsep Jurgen Habermas dalam (Yasraf A.Piliang, 2000: 104) bahwa “debat didalam ruang publik harus dilakukan dalam sebuah kondisi yang ideal yaitu komunikasi yang didalamnya tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan melakukan cara pemaksaan, penekanan dan dominasi”.

Dalam pemilihan kepala daerah, calon kepala daerah harus melakukan komunikasi dengan baik. Baik itu komunikasi dengan partai politik pengusung maupun dengan masyarakat selaku pemilih. Calon kepala daerah tidak bisa mengandalkan elektabilitas dan popularitasnya. Elektabilitas tinggi tetapi komunikasi politik yang kurang, akan menjadi kekurangan bakal calon kepala daerah. Komunikasi politik sangat penting, karena berhubungan dengan perolehan suara maupun pengkoordinasian mesin partai maupun relawan.

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 digelar di 270 daerah meliputi 9 provinsi dan 261 Kabupaten dan Kota. Tetapi pilkada 2020 kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena pilkada Tahun 2020 digelar di tengah pandemic covid-19 sehingga membatasi kegiatan komunikasi politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah, sehingga calon kepala daerah maupun tim sukses partai pengusung dan relawan mampu melakukan komunikasi politik yang maksimal ditengah pandemi covid-19.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah Tahun 2020 ditengah pandemi covid-19. Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020 diikuti oleh 2 pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati petahana maju kembali dalam kontestasi 5 tahunan ini tetapi tidak maju bersama lagi melainkan pecah kongsi. Bupati petahana H. Abdul Hafidz lebih memilih H. Muhammad Hanies Cholil Barro yang merupakan anak dari ulama besar, tokoh NU serta salah satu pendiri PKB KH. Cholil Bisri. H. Muhammad Hanies Cholil Barro dipilih oleh H. Abdul Hafidz untuk mendampingi karena sebelumnya Gus Hanies ini merupakan ketua GP Ansor Kabupaten Rembang. Pasangan Hafidz-Hanies ini diusung oleh 4 partai politik yaitu PPP, PKB, PDI Perjuangan dan Partai Golkar dengan mengantongi dukungan 25 kursi DPRD Kabupaten Rembang, sehingga pasangan ini dapat dikatakan pasangan Agamis atau Religius karena kedua sosok ini merupakan jebolan santri. Pasangan Hafidz-Hanies memasang tagline “REMBANG GEMILANG” yang artinya Gemati, Gampil dan Gamblang. Sedangkan wakil bupati petahana H. Bayu Andryanto dalam Pilkada Kabupaten Rembang 2020 maju kembali sebagai calon wakil bupati mendampingi H. Harno yang maju sebagai calon bupati. H. Harno merupakan pengusaha serta anggota DPRD Kabupaten Rembang, pasangan Harno-Bayu diusung oleh Partai Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, Gerindra dan Hanura dengan mengantongi 20 kursi DPRD Kabupaten Rembang. Pasangan Harno-Bayu ini memasang tagline “REMBANG MATOH” yang artinya Maju, Tanggap dan Kokoh.

Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020 sangat menyedot perhatian publik, karena kedua petahana Bupati dan Wakil Bupati maju lagi tetapi tidak

bergandengan, hal ini sangat berpengaruh terhadap proses kampanye maupun hasil Pilkada. Pertarungan antara kaum agamis dan nasionalis sangat terasa sekali karena selain sosok Hafidz-Hanies yang agamis pasangan ini juga didukung oleh partai dengan kekuatan Nahdliyin yang sangat besar yaitu PPP dan PKB, sosok Hafidz yang merupakan kader PPP dan Hanies kader dari PKB.

Pilkada Kabupaten Rembang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Rembang Kota, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Kaliori. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Rembang di menangkan oleh pasangan calon H.Abdul Hafidz dan H.Muhammad Hanies Cholil Barro. Dengan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel 1.1 Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2020.

| NO. | Nama Pasangan Calon | Hasil Perolehan Suara | Persentase |
|-----|---|-----------------------|------------|
| 1. | H.Harno,S.E dan H.Bayu Andriyanto,S.E (Demokrat,Nasdem,Gerindra,PKS,Hanura,PAN) | 208.726 | 49,3 |
| 2. | H.Abdul Hafidz dan H.Muhammad Hanies Cholil Barri (PPP,PKB,PDI Perjuangan,Golkar) | 214.327 | 50,7 |

Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang)

Dari tabel hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat bahwa selisih antar kedua kandidat calon kepala daerah Kabupaten

Rembang sangat tipis. Selisih kedua paslon hanya terpaut 5.601 suara atau 1,4%. Jika dilihat dari situasi dan kondisi perpolitikan di Kabupaten Rembang ini merupakan daerah agamis serta banyak tokoh-tokoh agama serta ulama besar yang dari Rembang, selain itu banyak juga tokoh agama yang juga politikus dari PPP dan PKB yaitu almarhum KH. Maimun Zubair salah satu ulama besar serta mantan ketua dewan syura PPP serta almarhum KH. Cholil Bisri, salah satu ulama besar dan pendiri PKB sekaligus ayah dari calon wakil bupati H. Muhammad Hanies Cholil Barro. Dengan adanya kedua tokoh ulama besar tersebut, Kabupaten Rembang dikenal daerah yang sangat agamis. Dalam Pilkada Kabupaten Rembang 2020 pasangan Hafidz-Hanies yang diusung oleh partai berbasis agamis PPP dan PKB dan partai berbasis nasionalis PDI Perjuangan dan Partai Golkar berhasil mengguguli lawannya dengan perolehan suara yang sangat ketat ini menandakan bahwa ada strategi komunikasi politik yang sangat signifikan yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies. Selain itu, dengan melihat perolehan suara yang sangat tipis antar kedua paslon ini menandakan bahwa tingkat kompetisi di Pilkada Kabupaten Rembang sangat tinggi, dengan kompetisi yang sangat tinggi ini tentu ada komunikasi politik yang harus dilakukan oleh paslon kepala daerah yang berhasil menang dalam pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Di balik kesuksesan pasangan Hafidz-Hanies, bagaimana komunikasi politik yang dilakukan secara baik oleh pasangan calon, partai pengusung dan relawan. Apalagi pelaksanaan pilkada kali ini digelar di

tengah pandemi covid-19, dimana seluruh kegiatan kampanye yang mengakibatkan pengumpulan massa banyak dilarang, kegiatan tatap muka untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja dibatasi, hanya melalui media massa kampanye penyampaian visi, misi dan program kerja bisa dilakukan oleh pasangan calon atau tim sukses.

Dari uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian mengenai “Komunikasi Politik Pasangan Hafidz-Hanies Kepada Partai Politik dan Pemilih Dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020”. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pesan dan metode komunikasi politik yang dilakukan oleh H.Abdul Hafidz dan H.Muhammad Hanies Cholil Barro kepada partai politik pengusung dan masyarakat selaku pemilih.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Bagaimana Pesan dan Metode dalam Komunikasi Politik yang dilakukan oleh pasangan H. Abdul Hafidz dan H. Muhammad Hanies Cholil Barro Kepada Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020?
- 1.2.2** Bagaimana Pesan dan Metode dalam Komunikasi Politik yang dilakukan oleh pasangan H. Abdul Hafidz dan H. Muhammad Hanies Cholil Barro Kepada Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pesan dan metode komunikasi politik yang dilakukan pasangan calon H.Abdul Hafidz dan H.Muhammad Hanies Cholil Barro kepada partai politik dan masyarakat selaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kontribusi serta wawasan yang ada pada literatur ilmu politik khususnya di bidang komunikasi politik. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan acuan untuk penelitian berikutnya, khususnya penelitian mengenai komunikasi politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang komunikasi pasangan calon kepala daerah dalam membangun komunikasi politiknya pada gelaran pemilihan kepala daerah.

2. Bagi Partai Politik.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi partai politik dalam membangun komunikasi politik pada gelaran pemilihan kepala daerah.

3.

Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat untuk memahami gaya komunikasi politik calon kepala daerah.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menambah informasi sekaligus pembandingan antara penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya bisa menjadi acuan dan bahan rujukan terhadap penelitian ini yang sedang dilakukan. Dengan demikian lebih banyak kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan rujukan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yandi Aziz dalam (Aziz, 2020). Penelitian ini menjelaskan tentang komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Ir.H.Muh Toriq Husler pada pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. Diketahui dalam pilkada Luwu Timur bahwa Ir.H.Muh Toriq Husler merupakan petahana sehingga komunikasi politik kepada partai pengusung maupun kepada masyarakat berjalan dengan baik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Givanadra Jatmiko dalam (Jatmiko, 2020). Penelitian ini tentang strategi pemenangan pasangan H. Muhammad Natsir dan Joko Sutanto dalam Pilkada Kabupaten

Demak Tahun 2015. Diketahui pasangan H. Muhammad Natsir dan Joko Sutanto akan menantang petahana dalam Pilkada Kabupaten Demak Tahun 2015. Dengan strategi kemenangan yang maksimal, pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto mampu mengalahkan petahana dalam Pilkada Kabupaten Demak Tahun 2015.

1.5.2 Tinjauan Teori

1. Komunikasi Politik

Secara sederhana, komunikasi politik hanya merupakan gabungan dari dua kata, komunikasi dan politik. Jika dua kata ini sudah digabungkan (komunikasi politik), memiliki makna yang lebih luas dan tidak sederhana. Secara interaksional, komunikasi politik memang berada pada domain komunikasi. Komunikasi politik telah menjadi jembatan bagi dua disiplin ilmu dalam ilmu sosial, yakni disiplin ilmu komunikasi dan ilmu politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi.

Pada prakteknya, yang terlibat dalam komunikasi politik melibatkan aspek bagaimana seorang belajar politik, bagaimana seorang menemukan sikap dan nilai-nilai yang berkenaan dengan Lembaga politik. Dalam buku *Mass Communication and American Politic*, Graber (Muhtadi, 2008) melihat komunikasi politik

sebagai kekuatan yang dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dengan kekuasaan.

Sementara itu, menurut Gabriel Almond Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya dijalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan dan adjudikasi peraturan.

Dan Nimmo mendefinisikan bahwa komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang bermuatan politik untuk tujuan kebijakan dengan berbagai konsekuensi yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan konflik. Sementara itu Astrid S.Susanto mendefinisikan bahwa komunikasi politik adalah yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi-sanksi yang ditentukan Bersama oleh Lembaga-lembaga politik.

Orientasi komunikasi politik menjadikan dua hal yang sangat berbeda *pertama* bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan tujuan itu sendiri dibentuk kedalam proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. *Kedua*, komunikasi

politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi dan berhubungan dengan masa lalu dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Berdasarkan pendapat di atas yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi yang memiliki muatan politik didalamnya serta relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan diantara sistem sosial dengan sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Selain itu, komunikasi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pencapaian Bersama.

Tujuan komunikasi politik sangat berhubungan secara erat dengan pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik kepada komunikan politik (penerima isi pesan). Tujuan komunikasi politik yaitu penyampaian informasi politik, membentuk citra politik, membentuk opini publik dan bisa pula untuk menyangkal pendapat atau tuduhan lawan politik. Menurut (Adawiyah, 2019) tujuan komunikasi politik yaitu :

1. Membangun Citra Politik

Citra politik akan terbentuk atau terbangun berdasarkan informasi yang kita terima, baik secara langsung maupun melalui media

politik, serta media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Sedangkan menurut Dan Nimmo, citra politik akan terjalin melalui pikiran dan perasaan dengan cara subjektif yang akan memberikan penilaian serta pemahaman terhadap peristiwa atau kejadian politik tertentu.

2. Membentuk dan Membina Pendapat Umum

Dalam komunikasi politik dapat membentuk pendapat umum yang sangat ditentukan oleh peran media terutama media massa. Memang pers, radio, film dan televisi selain memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, dan menghibur juga dapat membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik. Sedangkan menurut William Albig (Arifin 2011: 116), pendapat umum adalah hasil interaksi antara orang-orang dalam suatu kelompok.

3. Mendorong Partisipasi Publik

Bentuk partisipasi yang sangat penting yaitu ketika ada seseorang dengan suka rela memberikan suaranya untuk seorang politikus maupun partai politik di dalam pemilihan umum (Pemilu). Sedangkan Miriam Budiardjo mengartikan partisipasi publik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemerintah.

4. Sosialisasi Politik

Menurut David Easton dan Jack Dennis, sosialisasi politik sebagai suatu sebuah proses berkembangnya seorang untuk bisa mendapatkan sebuah orientasi politik serta pola-pola tingkah laku.

5. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik merupakan usaha untuk menanamkan, merubah, atau mempertahankan sistem nilai politik atau orientasi politik dengan mengaktifkan proses sikap, perilaku, sistem berfikir, pandangan seseorang atau kelompok, baik kader, simpatisan, dan masyarakat umum yang dilakukan oleh politikus.

6. Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik yaitu suatu usaha untuk mengajak kepada individu-individu masuk ke dalam orientasi dan nilai politik, yang pada akhirnya secara kongkrit menjadikan anggota politik baik simpatisan sampai kader politik dan pengurus organisasi politik.

Menurut Firmanzah dalam “Arifin, 2003:105”, terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu :

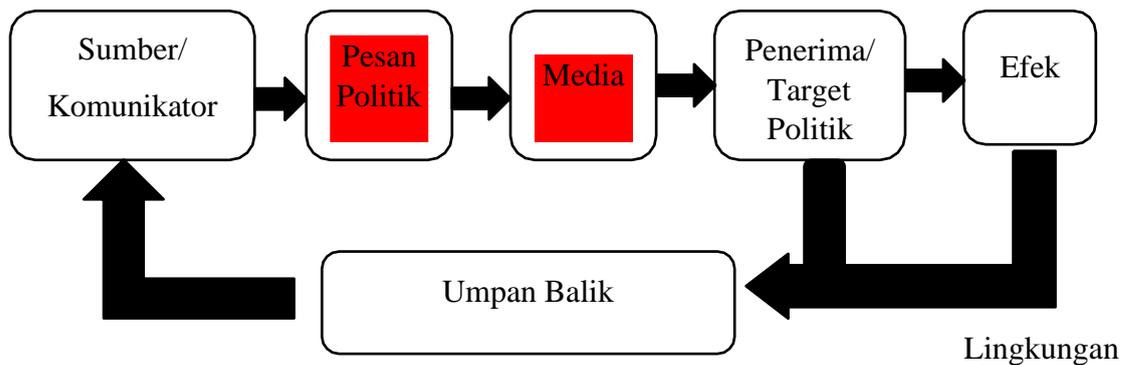
1. Retorika, berasal dari bahasa Yunani yaitu *Rhetorica*, yang artinya seni berbicara, asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar personal. Kemudian dapat berkembang

menjadi kegiatan komunikasi massa yaitu berpidato kepada khalayak.

2. Agitasi Politik, berasal dari bahasa Yunani yaitu *Agitare*, yang artinya bergerak atau menggerakkan. Agitasi bertujuan untuk membangkitkan rakyat terhadap suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami.
3. Propaganda, berasal dari bahasa Latin *Propagare*, yang artinya menanamkan tunas suatu tanaman. Propagandis yaitu orang yang melaksanakan propaganda dan mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar, hal ini biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan yang mudah terkena sugesti.
4. Public Relations Politics, merupakan suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik. *Public Relations Politics* bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, profesional atau aktivis (komunikator) dengan khalayak (kader, simpatisan, masyarakat umum).

5. Kampanye Politik, merupakan suatu metode komunikasi politik yang dilaksanakan oleh orang atau kelompok (organisasi ataupun partai politik) dalam waktu yang ditentukan dengan tujuan memperoleh dukungan secara politik dari rakyat selaku pemilih dalam pemilu. Kampanye politik merupakan rangkaian cara komunikasi politik yang telah direncanakan dengan tujuan dapat menciptakan efek tertentu dengan jumlah yang sangat besar kepada khalayak dan dilakukan secara terus menerus pada kurun waktu tertentu.
6. Lobi Politik, istilah lobi mengacu pada tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang di hotel. Dalam lobi politik pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat berpengaruh seperti kompetensinya, penguasaan masalah dan karisma. Lobi politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan konsensus.
7. Media Massa, sebagai perluasan panca indra manusia (*sense extension theory*) dan sebagai media pesan dalam hal pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan otoritas, membentuk dan mengubah opini publik atau dukungan serta citra politik, untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.

Menurut Muchlisin dalam (Cangara, 2009 : 31), ”unsur-unsur komunikasi politik” adalah sebagai berikut :



Sumber : “Tujuan, Unsur dan Bentuk Komunikasi Politik (Muchlisin Riadi, 2018)”

1. Komunikator Politik

Komunikator Politik merupakan sekumpulan individu yang bertempat di suatu organisasi (partai politik, asosiasi), lembaga media massa serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Komunikator politik dapat pula berupa negara, badan-badan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara. Komunikator Politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi.

2. Pesan Politik

Pesan Politik yaitu pernyataan yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.

3. Saluran atau Media Politik

Media politik merupakan sarana yang digunakan oleh para komunikator politik untuk menyampaikan pesan politiknya kepada komunikan. Saluran komunikasi kelompok berupa partai politik, ikatan alumni, organisasi sosial, organisasi profesi, keagamaan, karang taruna dan sebagainya. Saluran komunikasi publik dapat berupa stadion, aula, balai desa, alun-alun, panggung kesenian. Saluran komunikasi sosial berupa pertunjukan pesta rakyat, wayang, pesta pertanian dan sebagainya.

4. Sasaran atau Target Politik

Sasaran atau Target Politik yaitu rakyat selaku pemilih dengan harapan dapat memberikan dukungan kepada partai politik maupun kepada kandidat tertentu (dukungan suara). Sasaran atau target politik tersebut merupakan warga negara yang telah memiliki hak pilih dan telah tercatat kedalam daftar pemilih serta telah cukup umur untuk ikut serta didalam pemilu.

5. Pengaruh dan Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan yaitu menciptakan pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan sistem partai politik, dimana prosesnya akan berakhir pada pemberian suara. Pemberian suara tersebut dapat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sampai tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten.

Menurut Dan Nimmo dalam (Ardial, 2010 : 45-46) "Pesan Komunikasi Politik" adalah sebagai berikut :

1. Informatif

Bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. Menyampaikan isi pesan yang sesuai dengan fakta, data dan pendapat yang benar. Penerangan mempunyai fungsi memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta yang bersifat kontroversial atau memberikan informasi atau menuntun khalayak ke arah pendapat umum. Jadi, dengan penerangan (information) berarti pesan-pesan yang di lontarkan, berisi tentang fakta dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Persuasif

Mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal ini khalayak akan diduga jalan pikirannya dan terutama perasaannya. Metode persuasif ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberikan jalan untuk berfikir kritis, bahkan kalau perlu khalayak itu dapat terpengaruh dengan tidak sadar. Dengan demikian penggunaan metode ini menganjurkan komunikator agar terlebih dahulu menciptakan situasi

dimana komunikasi mudah terkena sugesti. Situasi yang mudah terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan untuk mensugestikan atau menyarankan sesuatu kepada khalayak.

3. Edukatif

Salah satu untuk mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang dilontarkan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman. Metode ini memberikan gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini diharapkan akan memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak, walaupun hal ini akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode persuasive.

4. Kursif

Kursif berarti mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Dalam hal ini khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima gagasan yang dilontarkan. Pesan dari komunikator politik memuat, selain pendapat dan pengalaman juga berisi ancaman. Metode ini biasanya dimanifestasikan ke dalam bentuk peraturan, perintah dan intimidasi yang pelaksanaannya didukung oleh kekuatan Tangguh. Menyusun pernyataan umum yang bersifat kursif tidaklah seluwes pernyataan umum yang lain, dan karena memang ada kekuatan yang mendukungnya, tentu efeknya akan lebih besar.

Komunikasi politik merupakan aktivitas komunikasi yang isi pesannya bermuatan politik, berakibat politik mempunyai pengaruh pada politik. Komunikasi politik bisa dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian simbol-simbol yang berisi pesan-pesan politik. Menurut Plano (Anshari, 2013) bahwa “komunikasi politik merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik”. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi keberhasilan partai politik, gabungan partai politik dan tim sukses untuk mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah dengan melihat kapasitasnya sebagai calon kepala daerah. Komunikasi politik sangat dibutuhkan untuk melihat dampak dan hasil yang bersifat politik.

Dalam proses penyampaian pesan politik dalam komunikasi politik, tentu ada metode atau saluran yang digunakan. Metode atau saluran komunikasi politik menurut Almond dan Powell dalam (Nasution, 1990) yaitu :

1. Tatap Muka

Metode komunikasi politik tatap muka berlangsung secara berhadap-hadapan (*face to face*). Misalnya seorang kandidat politik (capres, caleg, cakada) berbicara atau berkampanye didepan umum, seorang ketua atau elite partai politik melakukan konferensi di depan wartawan.

2. Media

Dalam komunikasi politik, media menjadi perantara antara komunikator dengan komunikan. Misalnya, kandidat politik (capres, caleg, cakada) membagikan pesan politiknya melalui media massa, media cetak maupun alat komunikasi lainnya.

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung. Peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Pilkada sesuai dengan UUD 1945 pada perubahan pertama yang terdapat dalam pasal 22E UUD 1945 yang menjelaskan bahwa untuk pemilihan kepala daerah baik pada tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melaksanakan pemilihan secara langsung setiap 5 tahun sekali oleh masyarakat didaerahnya. Pemilihan kepala daerah harus beraskan pada Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Menurut Joko J Prihatmoko menjelaskan asas tersebut sebagai berikut :

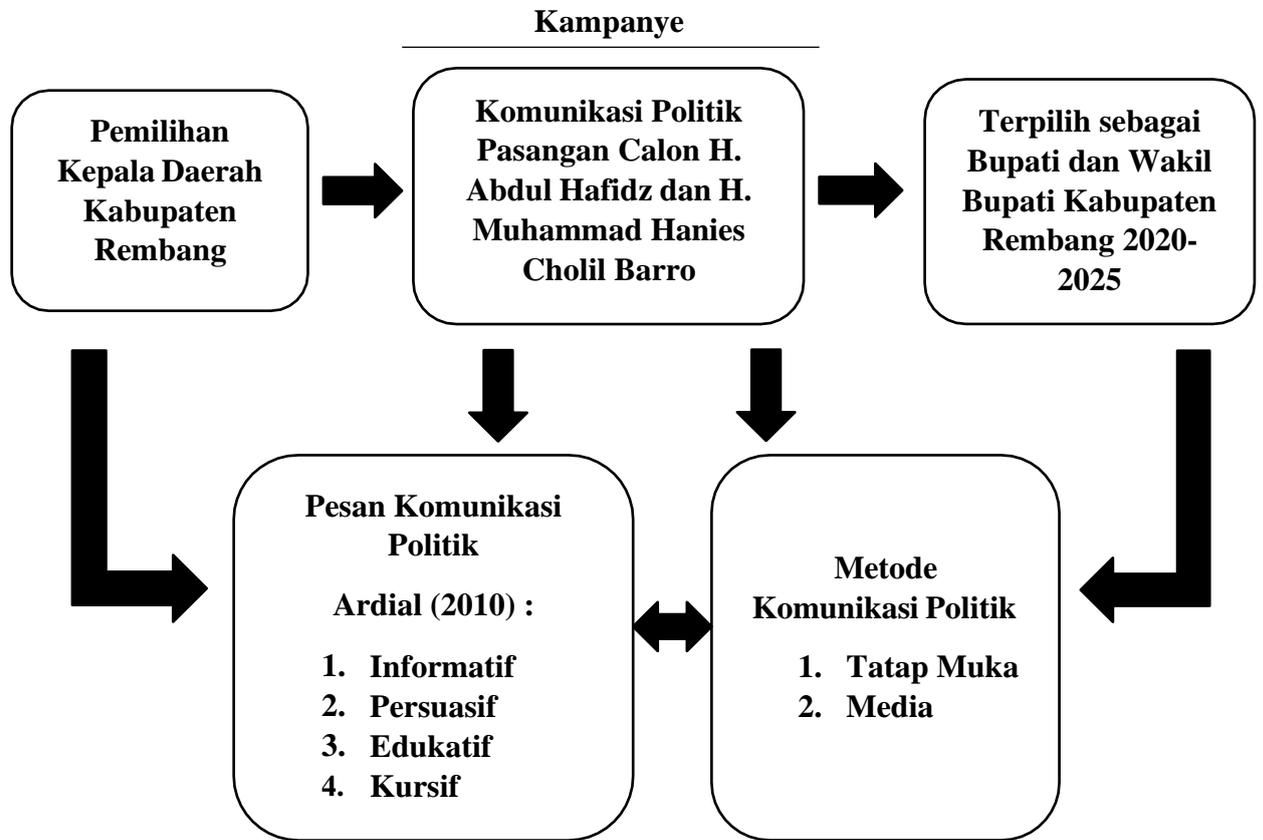
1. Langsung : Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung tanpa paksaan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.

2. Umum : Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan perundangan memiliki hak untuk memilih pada Pilkada.
3. Bebas : Rakyat sebagai pemilih bebas memilih tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Setiap warga negara dijamin keamanannya untuk melaksanakan haknya sehingga dapat memilih sesuai dengan keinginan, hati Nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia : Setiap warga negara dalam memberikan hak suaranya akan dijamin pilihannya tersebut tidak akan diketahui oleh pihak siapapun, manapun dan melalui jalan manapun. Pemilih dapat memberikan suaranya pada surat suara yang tidak dapat diketahuisiapapun atas pilihannya.
5. Jujur : Selama proses pelaksanaan pemilihan umum, setiap penyelenggara, aparat pemerintah, pengawas, calon, pemilih serta seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan umum diwajibkan untuk melaksanakan pemilihan umum secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil : Selama proses pelaksanaan pemilihan umum, setiap calon dan pemilih dalam pilkada akan memperoleh perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Sementara itu, menurut (Zuhro: 2009) Pilkada merupakan momentum untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Proses pelaksanaan pilkada tertuang kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasa 54 Ayat 1 yang berbunyi “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bagian dari kelanjutan kelembagaan demokratisasi, mengingat demokrasi ditingkat lokal merupakan pondasi yang krusial bagi adanya pembangunan demokrasi nasional. Keterlibatan rakyat secara langsung pada proses demokrasi, merupakan sebuah usaha perbaikan mutu pondasi demokratisasi ditingkat daerah hingga nasional. Selain itu menurut (Kristiyanto: 2017) melalui pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara.

Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, diharapkan mampu mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas, karena dalam pilkada ini terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara pilkada dan media massa.

1.6 Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah oleh penulis

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu pesan tersebut diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variable yang akan diteliti.

1.7.1 Komunikasi Politik

Tabel 1.2 Konsep Komunikasi Politik

| Pesan | Definisi Pesan | Indikator |
|------------|--|--|
| Informatif | Memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta yang bersifat kontroversional atau memberikan informasi atau menuntun khalayak ke arah pendapat umum. | Memberikan informasi tentang fakta atau memberikan keputusan atau menuntun khalayak ke arah pendapat umum dan menjelaskan dukungan berbagai pihak. |
| Persuasive | Mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Metode persuasive ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberikan jalan untuk berfikir kritis, bahkan kalau perlu khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar. | Memberikan ajakan sekaligus harapan. |
| Edukatif | Mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang dilontarkan, yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta dan pengalaman. Metode ini diharapkan akan memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak, kendatipun hal ini akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan metode persuasive. | Memberikan gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat, dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan . |

| | | |
|--------|---|--|
| Kursif | Mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Dalam hal ini, khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima gagasan yang dilontarkan. Metode ini biasanya dimanifestasikan kedalam bentuk peraturan, perintah dan intimidasi yang untuk pelaksanaannya didukung oleh kekuatan Tangguh. | Memberikan pendapat dan pengalaman yang juga berisi ancaman. |
|--------|---|--|

1.7.2 Metode Komunikasi Politik

Tabel 1.3 Metode Komunikasi Politik

| Metode | Definisi |
|------------|---|
| Tatap Muka | Pelaksanaan metode ini dijalankan dengan berhadap-hadapan antara komunikator dengan komunikan. |
| Media | Media menjadi perantara dalam proses komunikasi politik. Melalui media komunikator dapat menyampaikan pesan politiknya kepada khalayak. |

1.7.3 Konsep Pilkada

Praktek penyelenggaraan pemerintahan lokal (daerah) di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak zaman reformasi, hal tersebut bisa dilihat dari diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya UU tersebut, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi

lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi di tingkat lokal (daerah). Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan, artinya kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan ada di tangan rakyat. Dalam penelitian ini menggunakan konsep pilkada yang dikemukakan oleh Siti Zuhro dan E.N Kristiyanto. Dimana Siti Zuhro mendefinisikan bahwa pilkada merupakan momentum untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implemetasi demokrasi yang partisipatif. Sementara itu menurut E.N Kristiyanto dengan diselenggarakannya Pilkada langsung maka rakyat dapat memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin serta wakilnya dalam penyaluran aspirasi masyarakat yang selanjutnya dapat menentukan arah, tujuan serta masa depan sebuah negara.

Pilkada langsung merupakan sebuah proses untuk memilih Gubernur sebagai kepala daerahnya ditingkat Provinsi dan Bupati atau Walikota sebagai kepala daerah ditingkat kabupaten dan kota.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang spesifik, yaitu untuk menemukan, menggambarkan, mengembangkan atau mengetahui suatu kebenaran dari fenomena yang diteliti dengan cara mengumpulkan, menyusun dan merangkai suatu masalah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam karya ilmiah. Menurut Creswell (2016: 332), metode penelitian terdapat berbagai macam teknik pengumpulan, analisis serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya.

1.8.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitiannya yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Studi Kasus merupakan strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus di batasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Creswell (2009: 20). Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena dalam penelitian ini terdapat 2 pasangan calon yang maju dalam pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020. Kedua pasangan calon tersebut merupakan petahana, petahana Bupati dan petahana Wakil Bupati tetapi

dalam proses Pilkada perolehan suara kedua pasangan calon tersebut sangat tipis dengan selisih 1,4% suara.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu mengenai prosedur dan pelaksanaannya sesuai tahap-tahap penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2014) memberikan gambaran mengenai pendekatan kualitatif yang menciptakan atau secara induktif mengembangkan teori konstruktivisme sosial yang di dalamnya mengandung postpositivisme yang memuat agenda aksi perubahan yang dapat mengubah kehidupan para partisipan, Lembaga dimana mereka hidup dan bekerja atau bahkan kehidupan para peneliti itu sendiri. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan serta menganalisis data yang cenderung bersifat induktif.

Metode yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Creswell (2014: 135), penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, system terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya : pengamatan, wawancara, bahan audiovisual dan dokumen berbagai laporan) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan tempat dimana sumber data didapatkan. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu berada di Kabupaten Rembang. Dimana pilkada 2020 yang digelar ditengah pandemi covid-19 dilaksanakan di Kabupaten Rembang.

1.8.3 Subyek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dan memiliki data secara detail dan akurat berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap penulis memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang akan menjadi informan yaitu sebagai berikut :

1. H.Abdul Hafidz (Bupati Kabupaten Rembang)
2. H. Muhammad Hanies Cholil Barro (Wakil Bupati Kabupaten Rembang)
3. Ridwan,SH.MH (Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon H.Abdul Hafidz dan H.Muhammad Hanies Cholil Barro dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang)

Selain itu, dalam penelitian ini pengambilan subyek juga dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Creswell (2008 : 214) *Purposive Sampling* yaitu melakukan pemilihan/seleksi terhadap orang atau tempat yang terbaik yang dapat membantu kita dalam memahami sebuah fenomena.

Untuk memperoleh data penulis memilih beberapa orang untuk dijadikan sampel pengambilan data, dengan komponen 2 laki-laki dan 2 perempuan. Beberapa orang yang akan dijadikan sampel antara lain :

1. Muhammad Akmal Arravi, Masyarakat atau Pemilih, Umur : 23 Tahun
2. Amalia Nur Hidayati, Masyarakat atau Pemilih, Umur : 22 Tahun.
3. Ahmad Tri Wahyudi, Masyarakat atau Pemilih, Umur : 26 Tahun.
4. Luluatul Qomariyah , Masyarakat atau Pemilih, Umur : 20 Tahun.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari data primer dan data sekunder.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dari informan dan narasumber terkait dengan judul penelitian ini.

1.8.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui membaca, serta memahami dari sumber bacaan seperti literatur buku, jurnal,

media informasi serta penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan pada penelitian yang akan dilakukan.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan bersama dengan informan calon kepala daerah, tim sukses serta pemilih yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Guna mengetahui pihak-pihak tersebut, peneliti sempat kesulitan lantaran ketiadaan informan dari beberapa partai politik.

Ketiadaan informan dari beberapa partai politik karena tidak adanya kenalan atau jaringan dari beberapa partai politik tersebut. Meskipun keterbatasan informasi dari informan beberapa partai politik pengusung, peneliti berhasil melakukan wawancara dengan Bapak H. Abdul Hafidz selaku Bupati Rembang terpilih, Bapak H. Muhammad Hanies Cholil Barro selaku Wakil Bupati Rembang terpilih serta Bapak Ridwan selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang yang

merupakan salah satu partai politik pengusung Hafidz-Hanies, dalam struktur tim sukses Bapak Ridwan juga menjabat sebagai wakil ketua tim pemenangan Hafidz-Hanies.

Wawancara pertama yang peneliti lakukan adalah kepada Bapak Ridwan, karena peneliti memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan salah satu partai politik pengusung Hafidz-Hanies. Wawancara ini bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang. Sebelumnya peneliti melakukan komunikasi lewat WA dengan Bapak Ridwan kemudian janji untuk bertemu di kantor DPC. Dari wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai komunikasi politik Hafidz-Hanies kepada partai politik pengusung serta informasi mengenai kemenangan Hafidz-Hanies di Pilkada Kabupaten Rembang 2020.

Wawancara kedua yang peneliti lakukan yaitu kepada Bapak H. Abdul Hafidz. Dengan penuh ketidaksengajaan peneliti bertemu dengan Pak Hafidz di dalam acara Rakerda Angkatan Muda Ka'bah (AMK) salah satu sayap PPP. Peneliti sebagai tamu undangan yang mewakili sayap PDI Perjuangan duduk di belakang Pak Hafidz. Kemudian peneliti bicara dengan beliau untuk menentukan jadwal wawancara. Wawancara dengan Pak Hafidz peneliti lakukan di ruang bupati kantor Bupati Kabupaten Rembang. Dalam wawancara ini, peneliti

memperoleh banyak informasi yang kaitannya dengan komunikasi politik pasangan Hafidz-Hanies di Pilkada Kabupaten Rembang 2020.

Wawancara ketiga peneliti lakukan dengan Bapak Hanies atau Gus Hanies. Awalnya peneliti datang diacara nifsu sya'ban diajak oleh teman saya ternyata disitu ada Gus Hanies, kemudian peneliti minta jadwal oleh asprinya untuk melakukan wawancara. Wawancara dengan Gus Hanies dilaksanakan di ruang wakil Bupati kantor Bupati Kab. Rembang. Wawancara yang berlangsung hampir 1 jam ini peneliti memperoleh informasi banyak sekali yang kaitannya dengan komunikasi politik Hafidz-Hanies di Pilkada Rembang 2020.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat atau pemilih, diantaranya yaitu M. Akmal Arravi, Luluatul Qomariyah, Amalia Nur Hidayati dan Ahmad Tri Wahyudi. Wawancara ini dilakukan melalui pesan WA karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga pertemuan dilakukan melalui media sosial WA (online).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa jurnal, media massa, media cetak dan media sosial atau semacam dokumen untuk keperluan penelitian. Melalui Teknik ini, pengumpulan data

dilakukan melalui sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat (Faesal, 2002). Secara keseluruhan, data yang bersumber dari dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data-data dari media online, media sosial dan data-data lain atau karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

4.1.2 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian di analisis menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Analisis data ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh dari lapangan untuk memperjelas gambaran hasil dari penelitian. Dalam menganalisis data peneliti berdasarkan pada metode Creswell (Creswell, 1998: 153) bahwa ada empat metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data dalam sebuah penelitian studi kasus. Pertama, analisis dan interpretasi, dimana peneliti berusaha mengumpulkan contoh data dengan makna yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, Interpretasi langsung, peneliti secara langsung menggali dan mencari data dan mengungkapkan data tersebut. Ketiga, menetapkan pola dan mencari korespondensi anatar dua kategori atau lebih, peneliti mencari korespondensi antara kategori data tersebut. Keempat, generalisasi naturalistic, dimana peneliti menganalisis data secara generalisasi naturalistic dengan menggali sejumlah kasus lain.

4.1.3 Triangulasi Data

Setelah menganalisa data, tahapan berikutnya melakukan pengujian data meliputi *validitas internal*, *validitas eksternal*, *reliabilitas* dan obyektivitas. Peneliti mengarahkan tes untuk menunjukkan bahwa informasi yang didapat sama dengan informasi yang ditemukan sebelumnya. Dalam melakukan uji keabsahan data dari penelitian ini, penulis akan menggunakan Teknik uji kredibilitas Triangulis. Triangulis dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu. Dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulis sumber dan triangulis Teknik. Triangulis Sumber dilakukan untuk menguji informasi dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulis teknik dilakukan untuk menguji keabsahan informasi dengan benar-benar melihat informasi pada sumber yang sejenis dengan berbagai teknik. Jika berbagai cara menghasilkan informasi data yang berbeda, peneliti akan mengarahkan pembicaraan lebih lanjut dengan sumber informan tersebut atau pihak lain, untuk mengkonfirmasi data mana yang benar.